



## THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING GOVERNMENT POLICIES IN COMMUNITY EMPOWERMENT AT THE DEPARTMENT OF COOPERATIVES, MICRO SMALL MEDIUM BUSINESS IN BIAK NUMFOR REGENCY

### EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KABUPATEN BIAK NUMFOR

Regina D. Krobo<sup>1</sup>, Sri Handayani<sup>2</sup>, Djamil Hasim<sup>3</sup>, Dahlan<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Magister Administrasi Publik, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, YAPIS Biak

E-mail: [dahlanlan90@gmail.com](mailto:dahlanlan90@gmail.com)

#### ARTICLE INFO

##### Correspondent

**Dahlan**

[dahlanlan90@gmail.com](mailto:dahlanlan90@gmail.com)

##### Key words:

*effectiveness, policy, community empowerment*

##### Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

page: 034 - 038

#### ABSTRACT

*This study aims to determine the effectiveness of government policy implementation in community empowerment at the Office of Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises in Biak Numfor Regency. This research uses a "case study" approach in qualitative research and produces qualitative descriptive data. The data sources of this research consist of primary data and secondary data. The methods and strategies used in this research are literature studies, as well as observation methods and interview/interview methods to several sources/informants who are considered to be able to provide information related to the Effectiveness of Government Policy Implementation in Community Empowerment at the Cooperative Office, Micro, Small and Medium Enterprises in Biak Numfor Regency. The results of this study indicate that the effectiveness of government policy implementation in community empowerment at the Office of Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises in Biak Numfor Regency is quite effective when viewed from the achievement of goals, integration, adaptation and organizational characteristics, environmental characteristics, worker characteristics and management characteristics. In the implementation of program activities at the Office of Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises in Biak Numfor Regency, it has achieved its goals even though it is gradually in accordance with the budget and timeframe.*

Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p><b>Koresponden</b></p> <p><b>Dahlan</b> <i>dahlanlan90@gmail.com</i></p> <p><b>Kata kunci:</b> <b>efektivitas, kebijakan, pemberdayaan masyarakat</b></p> <p><b>Website:</b> <i><a href="https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER">https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</a></i></p> <p><b>hal: 034 - 038</b></p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Biak Numfor. Penelitian ini menggunakan pendekatan “studi kasus” dalam penelitian kualitatif dan menghasilkan data deskriptif kualitatif. Adapun sumber data penelitian ini yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode dan strategi yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, serta metode observasi dan metode wawancara/interview kepada beberapa narasumber/informan yang dianggap dapat memberikan informasi terkait Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Biak Numfor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Biak Numfor sudah cukup efektif jika dilihat dari pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi serta karakteristik organisasi, karakter lingkungan, karakter pekerja dan karakter manajemen. Dalam pelaksanaan kegiatan program pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Biak Numfor sudah mencapai tujuan walaupun secara bertahap sesuai dengan anggaran dan jangka waktu.</p> <p style="text-align: right;"><i>Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.</i></p>

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya yang dilakukan dalam mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan dapat diartikan juga sebagai upaya yang dilakukan oleh sekelompok individu, kelompok dan masyarakat luas dengan kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya untuk memenuhi keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang berkaitan dengan pekerjaannya, juga aktivitas sosialnya.

Berdasarkan landasan tersebut dapat dijelaskan bahwa pemerintah harus mengarahkan segala daya upaya dan segala biaya untuk mensejahterakan

masyarakat dengan berkeadilan sosial. Jika kenyataan yang ada bahwa banyak masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan melalui berbagai program agar dapat membantu masyarakat sehingga mereka dapat hidup sejahtera.

Dimensi kemiskinan dalam kehidupan masyarakat muncul dalam berbagai bentuk sehingga menyebabkan terjadinya budaya kemiskinan yang merusak kehidupan masyarakat bahkan menyebabkan rendahnya penghasilan masyarakat sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Tingkat kemiskinan yang terus meningkat menyadarkan semua pihak bahwa pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan selama ini perlu diperbaiki kearah pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang adalah suatu usaha produktif yang dimiliki oleh orang seorang atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang dimiliki dan dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Dengan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah, pemerintah dapat meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha mikro, kecil dan menengah dalam pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Program pembangunan dan pemberdayaan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat di Kabupaten Biak Numfor, maka program tersebut harus sesuai dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat yang akan ditingkatkan taraf hidupnya.

Dengan demikian kebijakan pemerintah lewat pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan efektif sehingga kehidupan masyarakat dapat berubah kearah yang lebih baik. Menurut Sondang dalam Othenk (2008:4), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdul Rahmat dalam othenk (2008: 7), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana prasana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tetap pada waktunya

Menurut Anderson dalam Agustino (2017:17) kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok aktor dalam mencapai tujuan walaupun dengan berbagai tantangan dan permasalahan.

Pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005:11) adalah Upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh Sumber daya manusia yang handal untuk itu pegawai pada Dinas Koperasi dan UMKM harus memiliki pendidikan

tinggi. Selain SDM yang handal, kinerja seseorang juga dapat mempengaruhi tujuan organisasi. Selain SDM organisasi juga dituntut untuk bisa bekerjasama dengan organisasi lain dalam pemberdayaan masyarakat. Adanya kesadaran dan interaksi yang baik antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan "studi kasus". Dalam penelitian terhadap suatu permasalahan yang terjadi sehingga perlu menggunakan jenis/tipe penelitian kualitatif. Metode dan strategi yang dipakai dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Metode wawancara/interview dilakukan kepada kepala dinas koperasi UMKM Kabupaten Biak Numfor, kepala sub bagian penyusunan program dan keuangan, kepala seksi fasilitasi usaha koperasi, kepala seksi peningkatan kualitas SDM koperasi dan kepala seksi pengembangan, penguatan, dan perlindungan usaha mikro. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian dilakukan pada dinas koperasi, usaha mikro kecil dan menengah Kabupaten Biak Numfor. Yang menjadi alasan dalam pemilihan lokasi penelitian adalah dinas koperasi, usaha mikro kecil dan menengah merupakan dinas pembuat dan pelaksana kebijakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebijakan suatu organisasi dikatakan efektif apabila suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan. Keinginan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan supaya nilai-nilai yang diinginkan sampai kepada publik.

Organisasi yang efektif adalah organisasi yang mencapai tujuan efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Organisasi dapat disebut efektif ketika dapat melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi kepuasan pelanggan, mencapai visi dan misi organisasi, pemenuhan aspirasi, menghasilkan keuntungan bagi organisasi, pengembangan sumberdaya manusia organisasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat di luar organisasi. Efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor dikatakan efektif apabila terdapat indikator indikator yang terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. sudah dilakukan dan dinikmati oleh masyarakat dalam hal ini gerakan koperasi dan usaha Mikro Kecil di Kabupaten Biak Numfor.

Salah satu indikator efektivitas kebijakan adalah Integrasi. Kebijakan yang efektif juga di dukung oleh kemitraan yang ada. Dari hasil penelitian maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya integrasi maka pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat efektif karena integrasi merupakan suatu kondisi kesatuan hidup bersama, saling berinteraksi dan bekerjasama. Selain indikator pencapaian tujuan dan integrasi, indikator adaptasi juga sangat diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan

pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat agar efektif. Dicapai oleh masing-masing pegawai dalam pelaksanaan tugas pekerjaan berdasarkan ukuran dan waktu yang telah ditentukan guna mewujudkan tujuan organisasi.

Dari hasil pengamatan penulis selama beberapa bulan ini bahwa jumlah pegawai yang memiliki Sumberdaya manusia yang terampil dan handal di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor masih sangat kurang dan perlu penambahan pegawai yang mempunyai keahlian dan memiliki kinerja yang baik agar dapat menunjang kelancaran pekerjaan pada organisasi.

Penyusunan program dan keuangan, Sapariah, S. Sos yang menjabat sebagai kepala seksi Fasilitas Usaha Koperasi, Korneles Koibur, SE selaku kepala seksi peningkatan kualitas SDM koperasi dan Marice K. Rumpaisum, BA sebagai kepala seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro bahwa organisasi terdiri atas berbagai unsur yang saling berkaitan, jika salah satu unsur memiliki kinerja yang buruk maka akan mempengaruhi kinerja.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Suatu organisasi yang menerapkan suatu kebijakan dianggap efektif apabila mengikuti langkah-langkah dan proses sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor adalah fitur organisasi dan fitur administratif. Untuk mencapai tujuan organisasi, maka kebijakan dilaksanakan sesuai dengan Rencana dan Strategi (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor, sehingga setiap kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif, terbukti dengan banyaknya program-program tersebut dilaksanakan sesuai renstra dan disalurkan kepada masyarakat, dalam hal ini koperasi dan toko perusahaan Mikro Biak di kawasan Numfor.

### **Saran**

Penulis mengajukan saran bahwa pemerintah daerah harus didorong dan didukung untuk mengimplementasikan Kebijakan Pemerintah Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Biak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurahmat. 2008. Efektivitas Organisasi Edisi Pertama. Jakarta: Airlangga
- Othenk, Sondang 2008. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta: Asdi Mahasatya
- Agustino, Leo. 2017. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Sumaryadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: CV Citra Utama
- Dianingratri, R., & Munandar, M. A. (2022). Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal Melalui Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2019. *Unnes Political Science Journal*, 6(2), 36-41.